

RANCANGAN PERUBAHAN

RENCANA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

TAHUN 2025



KABUPATEN TANA TIDUNG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	7
2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2025	18
2.3 Isu-isu Penting Pelayanan Tugas dan Fungsi	20
2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan	20
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	21
3.1 Tujuan dan Sasaran	21
3.2 Program dan Kegiatan	21
BAB IV PENUTUP	29



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM**

Alamat : Jl. Perintis Komplek SMP-SMA Unggulan Terpadu, Tideng Pale
SESAYAP

Kode Pos : 70611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN TANA TIDUNG**

NOMOR : B.000.7.2.4/246/DPPKU/V/2025

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pergeseran kegiatan Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung Nomor : / /DPPKU-KTT/VIII/2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 08);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 63);
17. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor ...).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024

KESATU : Sesuai Diktum KETIGA yang semula berbunyi : Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud, yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

KEDUA Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan
 Perangkat Daerah
 Bab V Penutup

 : Ketentuan DIKTUM KETIGA diubah, sehingga ketentuan DIKTUM KETIGA berbunyi :
 Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud, yang terdiri dari :

 Bab I Pendahuluan
 Bab II Evaluasi Renja PD sampai dengan Triwulan II
 Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 Bab IV Penutup

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Evaluasi Renja PD sampai dengan Triwulan II
Bab III	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV	Penutup

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal, Mei 2025



HARDANI YUSRI,SE

NIP. 197308072006041009

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan. Penyusunan Perubahan Renja PD ini mengacu pada Perubahan RKPD, Renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025.

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Bupati Tana Tidung Nomor : 80 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025, maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain adanya penyesuaian kebutuhan beberapa kegiatan yang mengalami perubahan kondisi terkait aturan yang ada. Berbagai pertimbangan yang diambil dalam perubahan rencana kerja ini, tidak terlepas dari arah kebijakan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta tetap memperhitungkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi rencana kerja hingga triwulan I juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan perubahan rencana kerja tahun anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Perubahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

- Tana Tidung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 04);
 17. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 63);
 18. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor);
 19. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor);
 20. Surat Edaran Bupati Tana Tidung Nomor: 050.13/100/BUP/V/2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022, maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025, dalam upaya percepatan

pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan dalam melaksanakan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
- b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- c. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan disertai gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah

BAB II. EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pegeseran/penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru / kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I

Pada tahun 2025 terdapat 11 Program dan 17 kegiatan dengan 31 sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung. Secara keseluruhan capaian fisik program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung sampai dengan April 2025 mencapai 22.61 % dengan capaian realisasi keuangan sebesar 23.59 %.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2025 sampai dengan triwulan I secara fisik dan aktivitas administrasi sudah berjalan namun belum semuanya sampai pada tahap pencairan sehingga menyebabkan anggaran belum terserap secara maksimal adalah sebagai berikut:

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub-output)	Target Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025)		Keterangan
					I		
1	2	3	4		5		6
			K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	43 %	Rp 113.965.200,00	Rp	0	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						
1	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	14 Unit Usaha	Rp 113.965.200,00	3 Unit Usaha	Rp	0 Pada TW I Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan sebanyak 3 Unit Usaha (Koperasi yang sudah Melaksanakan RAT) dari target Koperasi yang akan dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan pada Tahun 2025 sebanyak 14 Unit Usaha Hal tersebut menunjukan pada TW 1 baru 21% koperasi yang belaksanakan RAT masih ada waktu sampai dengan TW 2 agar Target dapat tercapai berdasarkan Permenkop UKM No. 19 Tahun 2015 dan UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi Aktif wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling lambat 6 bulan setelah tutup buku. Rat merupakan kewajiban setiap koperasi, karena merupakan wujud dari pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada anggota atas kinerjanya. Pelaksanaan RAT oleh koperasi di harapkan bisa dilaksanakan awal tahun yaitu antara bulan januari sampai dengan bulan maret, hal tersebut bisa di jadikan indikator bahwa koperasi di kelola dengan baik.
Rata-rata capaian kinerja (%)					21,43	0,00	
Predikat kinerja					SR	SR	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM/Pengurus Koperasi yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	31 %	Rp 83.221.100,00	Rp	0	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	Rp 83.221.100,00	0 Orang	Rp	0 Triwulan I persiapan tahapan administrasi dalam pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Terkait Kelembagaan
Rata-rata capaian kinerja (%)					0,00	0,00	
Predikat kinerja					SR	SR	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang menjadi Wira Usaha	1 %	Rp 71.067.600,00	Rp	0	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						
3	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	Rp 4.385.600,00	0 Unit Usaha	Rp	0 Triwulan I masih dalam tahapan persiapan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro melalui aktivitas penyuluhan standarisasi kemitraan dan publik speaking untuk pelaku UKM
4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	4 Unit Usaha	Rp 502.930.001,00	0 Unit Usaha	Rp	0
5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	11 Orang	Rp 66.682.000,00	0 Orang	Rp	0 Triwulan I menyiapkan administrasi terkait materi yang akan di koordinasikan dengan lembaga atau intansi terkait dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha UKM
6	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	120 Unit Usaha	Rp 50.301.423,00	0 Unit Usaha	Rp	0
Rata-rata capaian kinerja (%)					0,00	0,00	
Predikat kinerja					SR	SR	

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase usaha mikro terhadap seluruh UKM	1,2 %	Rp 217.070.700,00		Rp 0	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							
7	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	168 Unit Usaha	Rp 217.070.700,00	0 Unit Usaha	Rp	0
							Triwulan I masih dalam tahapan persiapan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumberdaya Manusia serta Desain dan Teknologi melalui aktivitas Fasilitas Pemasaran Produk UKM, Standarisasi Produk (Halal) dan Pelatihan Branding dan Kemasan Produk
Rata-rata capaian kinerja (%)					0,00	0,00	
Predikat kinerja					SR	SR	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Rasio sarana distribusi perdagangan yang berfungsi baik	66 %	Rp 1.062.952.509,00		Rp 15.338.700,00	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							
8	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	Rp 913.825.034,00	0 Unit	Rp	0
							TW 1 untuk kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dalam proses administrasi penunjukan dan persiapan proses Pemeliharaan, pengawasan dan Penyusunan dokumen Perencanaan pasar
9	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	Rp 149.127.475,00	1 Unit	Rp 15.338.700,00	TW 1 aktivitas yang terlaksana yaitu pemungutan atas retribusi pasae baik kios maupun los
Rata-rata capaian kinerja (%)					16,67	5,14	
Predikat kinerja					SR	SR	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kabupaten	2 %	Rp 568.670.700,00		Rp 331.970.000,00	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							
10	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	Rp 123.184.000,00	1 Laporan	Rp	0
							TW 1 aktivitas yang terlaksana yaitu Pemantauan Pendistribusian LPG 3 Kilo Gram di Wilayah Kabupaten Tana Tidung
11	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4 Laporan	Rp 27.264.000,00	1 Laporan	Rp	0
							TW 1 aktivitas yang terlaksana yaitu Pemantauan Harga Bahan Makanan Pokok di Tingkat Pasar di wilayah Kabupaten Tana Tidung
12	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	Rp 394.672.700,00	1 Laporan	Rp 331.970.000,00	TW 1 aktivitas yang terlaksana yaitu Pasar Murah bersubsidi menjelang hari Raya Idul Fitri
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
13	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 Laporan	Rp 23.550.000,00	0 Laporan	Rp	0
							TW 1 Persiapan Administrasi terkait Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi untu dipastikan bahwa penyaluran pupuk tersebut tepat sasaran ke petani yang berhak
Rata-rata capaian kinerja (%)					25,00	21,03	
Predikat kinerja					SR	SR	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat UTP yang bertanda tera sah yang berlaku	66 %	Rp 359.402.700,00		Rp 0	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							
14	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang	200 Unit	Rp 252.757.700,00	0 Unit	Rp	0
							Alat yg digunakan untuk UTPP oleh BSMI Banjarmasin dikalibrasi di TW I
15	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang	Rp 106.645.000,00	3 Orang	Rp	0
							TW I akan dilaksanakan setelah Alat UTPP selesai di Kalibrasi
Rata-rata capaian kinerja (%)					1,00	0,00	
Predikat kinerja					SR	SR	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentas Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Industri yang di manfaatkan	16,67 %	Rp 1.932.234.500,00		Rp 0	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						
16	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Rp 127.821.900,00	0 Dokumen	Rp 0	
17	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	Rp 1.609.432.500,00	0 Dokumen	Rp 0	Triwulan I penyiapan administrasi Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Terkait Aktivitas Pelatihan Membuat Sabun, Pelatihan Menjahit Lanjutan, Gelar Produk, Pelatihan Tahu Tempe
Rata-rata capaian kinerja (%)					0,00	0,00	
Predikat kinerja					SR	SR	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang Memiliki izin	13,29 %	Rp 62.426.800,00		Rp 0	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	Rp 62.426.800,00	0 Dokumen	Rp 0	Triwulan I penyiapan administrasi Monitoring Perizinan Berusaha Pelaku IKM
Rata-rata capaian kinerja (%)					0,00	0,00	
Predikat kinerja					SR	SR	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengolahan Informasi Izin Industri Sesuai Kewengan	13,29 %	Rp 132.553.300,00		Rp 0	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						
19	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Rp 132.553.300,00	0 Dokumen	Rp 0	Triwulan I penyiapan administrasi Fasilitasi Penginputan Sinas
Rata-rata capaian kinerja (%)					0,00	0,00	
Predikat kinerja					SR	SR	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur Terhadap Pelayanan Kantor	85 %	Rp 11.532.649.491,00		Rp 1.961.189.921,00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
20 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 14.998.900,00	3 Dokumen	Rp	0	TW 1 Tersusunya Dokumen Perencanaan Ranwal Renja 2026, PK ASN dan Rencana Aksi TA 2025
21 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp 9.929.500,00	2 Laporan	Rp	0	TW 1 Tersusunya Laporan Capaian Kinerja Organisasi OPD dan IKK LPPD TA 2024
22 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 1.760.000,00	1 Laporan	Rp	0	Tersusunya Laporan Evaluasi Kinerja TW 1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
23 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Rp 7.162.087.985,00	40 Orang/bulan	Rp 1.932.389.921,00	0	Tersedianya Laporan Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan Bulam Maret 2025
24 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	Rp 200.570.000,00	0 Dokumen	Rp	0	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Masing - masing Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2025
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
25 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	Rp 49.893.000,00	0 Orang	Rp	0	Masih Menunggu Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
26 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 460.516.000,00	0 Paket	Rp	0	Proses Pengadaan
27 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 200.005.756,00	0 Paket	Rp	0	Proses Pengadaan
28 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 30.522.900,00	0 Paket	Rp	0	Proses Pegadaan
29 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Rp 631.452.000,00	1 Laporan	Rp	0	Sudah terlaksana terakit aktivitas koordinasi dan konsultasi aktivitas ini berlanjut setahun berjalan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
30 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Rp 24.892.000,00	0 Unit	Rp	0	Proses Pengadaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Rp 5.088.000,00	0 Laporan	Rp	0	Sudah terlaksana terakit aktivitas Surat Menyurat aktivitas ini berlanjut setahun berjalan
32 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Rp 84.208.000,00	1 Laporan	Rp	0	Sudah terlaksana terakit aktivitas Penyediaan Sumberdaya Air dan Listrik aktivitas ini berlanjut setahun berjalan
33 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 579.120.000,00	3 Laporan	Rp 28.800.000,00	0	Sudah terlaksana terakit aktivitas belanja Honorarium Tenaga Kontrak aktivitas ini berlanjut setahun berjalan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Rp 102.290.950,00	0 Unit	Rp	0	Sudah terlaksana terakit aktivitas Pemeliharaan Kendaraan Oprasional Lapanagan aktivitas ini berlanjut setahun berjalan
35 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	Rp 34.080.000,00	0 Unit	Rp	0	Dalam Proses

Secara umum faktor penyebab tidak / kurang tercapainya target hasil / keluaran untuk kegiatan yang telah direncanakan, antara lain :

Belum dijalankannya beberapa program ,kegiatan dan aktivitas yang telah direncanakan, hal ini terkait adanya kendala teknis terkait adanya fesiensi anggaran dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan yang baru akan di mulai pada triwulan II, III dan IV yaitu bulan April – Desember tahunn 2025, sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja OPD

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1 berikut:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2025

[illegible]

P-RENJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM TA. 2025

P-RENJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM TA. 2025 16

Tabel 2.2
Rekomendasi Evaluasi P-Renja Triwulan I Tahun 2025

Lampiran 1
Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Triwulan : I (Satu)
Persentase Realisasi Kinerja : 7,96 (SR)
Persentase Realisasi Keuangan : 2,56 (SR)

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN	CATATAN	TINDAK LANJUT PD
1	2 (dua) sub kegiatan tidak dilaksanakan di RENSTRA tetapi ada di RENJA 1. Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Karena pada saat Penyusunan Renstra sub kegiatan ini tidak teridentifikasi bersifat rutin karena belum ada definisi operasional sub kegiatan dalam rangka memfasilitasi para Pelaku Perdagangan terkait Perpanjangan Penempatan Kios dan Los yang sifatnya rutin dilaksanakan setiap tahun 2. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Karena pada saat Penyusunan Renstra sub kegiatan ini pada saat penyusunan renja bidang terkait (Industri) Rencana akan melakukan Perubahan atas Dokumen RPIK Rencana Pembangunan Industri)	Butuh informasi lebih spesifik terkait kendala dimaksud apa yang melatarbelakangi sub kegiatan tersebut ada di renja tetapi tidak ada di renstra, apabila dilatarbelakangi adanya edaran pusat, amanat regulasi, mandatory spending maka perlu dilakukan koordinasi kembali kepada Bappeda dan Litbang	Dimohon agar segera mengumpulkan Laporan Hasil Evaluasi Renja Triwulan I (Satu) Tahun 2025.	Untuk kedepannya sebelum penyusunan RENSTRA akan dilakukan mapping/pemetaan untuk program kegiatan
2	43 (empat puluh tiga) sub kegiatan yang terdapat di RENJA terlaksana 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan di Triwulan I. Karna prioritas anggaran yang mengakomodir sub kegiatan di TA 2025	Lakukan evaluasi internal, perlu dipertimbangkan di sisi konteks dan tingkat urgensi sub kegiatan yang dimaksud, perlu evaluasi kembali kebutuhan Sub Kegiatan (apakah Sub Kegiatan tersebut masih relevan dan dibutuhkan dalam tahun berjalan, jika tidak prioritas atau bisa ditunda maka ada baiknya dihapus dan ditunda untuk tahun anggaran berikutnya apabila Sub Kegiatan Urgen/prioritas maka ajukan agar dapat di danai pada saat APBD perubahan). Lakukan koordinasi ke Bappeda dan BPKAD terkait solusi teknis dan administratif terbaik.	Perlu nya Perangkat daerah memperbaiki dan Menyesuaikan Target Kinerja pada renja Perubahan, mengingat Renja Perubahan 2025 merupakan Baseline Renstra Perangkat Daerah 2025-2029	Untuk kedepannya sebelum penyusunan RENJA akan menyesuaikan dengan RENSTRA sehingga dokumen perencanaan dapat sinkron

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN	CATATAN	TINDAK LANJUT PD
3	Untuk kegiatan fisik bidang perdagangan di TW I masih proses penunjukan langsung dari pejabat pengadaan	Laksanakan sesuai jadwal, mekanisme dan regulasi yang ada		Melakukan koordinasi dengan pejabat pengadaan agar kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal
4	Bidang koperasi & UKM dan Industri di TW I proses administrasi dan koordinasi narasumber	Laksanakan sesuai jadwal, mekanisme dan regulasi yang ada		Berkoordinasi dan menyiapkan administrasi yang diperlukan agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal
5	Alat uji standar yang digunakan untuk kegiatan tera ulang UTTP, oleh BSML Banjarmasin di jadwalkan kalibrasi di TW I TA 2025	Laksanakan sesuai jadwal, mekanisme dan regulasi yang ada		Kegiatan tera akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya setelah alat uji standar selesai di kalibrasi

Mengetahui
Kepala


Hardani Yusri, S.E
 Nip. 197308072006041009

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2025

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perindagkop dan UKM tahun anggaran 2025 triwulan I diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Evaluasi Kinerja Pelayanan Terhadap Indikator Kinerja Utama
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING/KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT
			TW 1	TW II	TW III	TW IV	TW 1	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya Pemjualan Industri Kecil dan Menengah	Persentase IKM yang Mengalami Peningkatan Omzet	6,22%	10,94%	16,98%	22,81%	1,33%				Pengawasan dan Pembinaan terhadap IKM belum maksimal dikarenakan adanya efesiensi anggaran	Melakukan Efisiensi Anggaran sesuai dengan ketentuan dengan tidak mengurangi hal-hal yang pokok dan segera menginstruksikan pelaksanaan kegiatan
2	Meningkatnya Volume Usaha Mikro dan Volume Usaha Koperasi	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan Volume Usaha	2,10%	2,12%	2,18%	3,30%	2,10%				Melaksanakan Pendataan dan Pembinaan secara berkelanjutan , dengan adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan yang di rencanakan belum berjalan maksimal	Melakukan Rapat Internal Bidang terkait progres pelaksanaan kegiatan setelah efisiensi
		Persentase Koperasi yang mengalami peningkatan Volume Usaha	3,50%	3,70%	4,50%	4,97%	3,50%				Pengawasan dan Pembinaan dilaksanakan ,akan tetapi belum maksimal di karenakan adanya efisiensi anggaran	Melakukan Rapat Internal Bidang terkait progres pelaksanaan kegiatan setelah efisiensi
3	Meningkatnya Trasaksi Jual Beli sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan Omzet Pedagang	16,00%	31,00%	28,00%	25,00%	14,00%				Kuarngnya Minat Masyarakat untuk brerbelanja di pasar karena komoditas yang di jual tidak lengkap dan kurang beragam	Melakukan Pembinaan dan Pendampingan kepada pedagang pasar

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2025 antara lain :

- a. Keterbatasan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia, baik di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM maupun stakeholder;
- b. Tingkat kompetensi IKM/UKM Kabupaten Tana Tidung (kualitas, daya saing, pemasaran) yang masih rendah;
- c. Perlunya peningkatan penumbuhan wirausaha baru berbasis sumberdaya lokal yang berdaya saing;
- d. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar serta tingginya fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat;
- e. Kurangnya legitimasi tempat usaha dan rendahnya ketersediaan skim permodalan bagi UKM.
- f. Rendahnya likuiditas koperasi, pemahaman stakeholder dan penegakan hukum yang masih lemah tentang perkoperasian serta keterampilan manajemen Perindagkop dan UKM.

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Perubahan Renja 2025 ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung menghimpun usulan-usulan program kegiatan dari stakeholders dan masyarakat dan melihat kebutuhan pada masyarakat yang akan menjadi pertimbangan dalam menyusun program kegiatan pada Perubahan Renja 2025 ini. Selanjutnya usulan ini disinergikan dengan rencana program kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sesuai dengan tugas dan fungsi serta dalam rangka pencapaian target-target pembangunan daerah. Perubahan Program Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja pada Bab III.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor penentu keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Tujuan organisasi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan akan lebih mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Sasaran yang ingin dicapai.

Adapun tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung adalah **Meningkatnya Kinerja Sektor Industri, perdagangan, UKM, dan Koperasi**

.

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penjualan Industri Kecil dan Menengah;
2. Meningkatkan Volume Usaha Mikro dan Volume Usaha Koperasi
3. Meningkatkan Transaksi Jual Beli Sektor Perdagangan

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung disusun dengan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Pergeseran anggaran
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja
3. Penambahan atau pengurangan pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran

Pada dasarnya dalam Perubahan Renja ini tidak terlalu banyak mengalami perubahan, hanya penyesuaian terkait fokus pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisa dan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana tetap berusaha memperhatikan faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada perubahan rencana kerja tahun 2025 berkaitan dengan pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dimana merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026, RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026.

Penyajian rancangan perubahan rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2025 pada table berikut :

Tabel 3.1
PENYAJIAN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan				Lokasi	Pagu Indikatif			Keterangan
		Tolak Ukur Kinerja		Target Capaian Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9 = 9-8	10
	Bidang Urusan Koperasi dan UKM						524.229.500	524.229.500		
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	0.22Persen	24 Persen		62.366.000	62.366.000		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Aktif yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi Aktif yang melaksanakan RAT	14 Unit Usaha	14 Unit Usaha		62.366.000	62.366.000		
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	14 Unit Usaha	14 Unit Usaha		62.366.000	62.366.000		
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Bersertifikat	Persentase SDM Koprasi yang Berdertifikat	0.03Persen	46 Persen		70.248.000	70.248.000	-	
2 17 05 2 01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih	Jumlah SDM Koperasi yang Terlatih	30 Orang	30 Orang		70.248.000	70.248.000	-	
2 17 05 2 01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	30 Orang		70.248.000	70.248.000	-	
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0.02Persen	2,19 Persen		82.455.000	82.455.000	-	
2 17 07 2 01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang di fasilitasi	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha		82.455.000	82.455.000	-	
2 17 07 2 01 01	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha		66.319.000	66.319.000	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	11 Orang	6		16.136.000	16.136.000		

						Bidan Urusan Perdagangan						1.297.833.835	1.288.789.660	(9.044.175)	
3	30	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang aktif yang di kelola	Persentase Sarana Perdagangan yang Aktif di Kelola	50 Persen	50 Persen		320.457.035	311.412.860	(9.044.175)	
3	30	03	2	01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar/Pusat Kuliner/Pusat Perbelanjaan yang dibangun/direvitalisasi/direhab dan ditingkatkan	Jumlah Pasar/Pusat Kuliner/Pusat Perbelanjaan yang dibangun/direvitalisasi/direhab / ditingkatkan dan di kelola	1 Unit	3 Unit		320.457.035	311.412.860	(9.044.175)	
3	30	03	2	01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit		234.421.960	225.384.160	(9.037.800)	Geser Ke Biaya Tagihan Bulanan PDAM Pasar Imbayud dan Token Listrik untuk CCTV Pasar Imbayud
3	30	03	2	01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	3 Unit		86.035.075	86.028.700	(6.375)	Geser Ke gaji
3	30	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu perkomoditas	Persentase koefisien variasi harga antar waktu perkomoditas	2 Persen	2 Persen		715.746.000	715.746.000	-	
3	30	04	2	02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan harga bahan pokok dan barang penting per komoditas yang berfluktuasi	Jumlah laporan harga bahan pokok dan barang penting per komoditas yang berfluktuasi	4 Laporan/ Tahun	4 Laporan/ Tahun		715.746.000	715.746.000	-	
3	30	04	2	02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan		121.578.000	121.578.000	-	
3	30	04	2	02	03	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4 Laporan	4 Laporan		13.308.000	13.308.000	-	
						Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 Laporan	2 Laporan		580.860.000	580.860.000		
3	30	04	2	03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	39,43Persen	2 Laporan		-	-	-	
3	30	04	2	03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 Laporan	2 Laporan		-	-	-	
3	30	06				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTPP yang beroperasi sesuai Standar	Persentase Alat UTPP yang beroperasi sesuai Standar	200 Unit	200 Unit		261.630.800	261.630.800	-	
3	30	06	2	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang di awasi dan di berikan penyuluhan Jumlah Alat UTPP tersegel yang memenuhi standar	Jumlah Alat UTPP tersegel yang memenuhi standar	150 Orang200 Unit	150 Orang200 Unit		261.630.800	261.630.800	-	
3	30	06	2	01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	200 Unit	200 Unit		203.989.800	203.989.800	-	
						Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang	150 Orang		57.641.000	57.641.000	-	

					Bidang Urusan Perindustrian					1.085.737.800	1.085.737.800	-	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Potensi Industri yang berkembang	Persentase Potensi Industri yang berkembang	33.33Persen	33,33 Persen	957.988.300	957.988.300	-	
3	31	02	2	01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah potensi Industri yang terpetakan	Jumlah potensi Industri yang terpetakan	15	15	957.988.300	957.988.300	-	
3	31	02	2	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	957.988.300	957.988.300	-	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang Memiliki izin Sesuai Ketentuan	Persentase IKM yang memiliki izin sesuai ketentuan	5.05Persen	5.05Persen	46.916.200	46.916.200	-	
3	31	03	2	01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Perizinan Berusaha sektor Perindustrian	Jumlah pelaku usaha Industri yang memiliki legalitas usaha (perizinan berusaha)	2Dokumen	20 Dokumen	46.916.200	46.916.200	-	
3	31	03	2	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang	2 Dokumen	20 Dokumen	46.916.200	46.916.200	-	
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang mengakses media Informasi Industri	Persentase Pelaku Usaha Industri yang Melaporkan Perkembangan Usahanya	6.31Persen	6,31 Persen	80.833.300	80.833.300		
					Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Media Informasi Industri yang tersebar dan dapat di akses masyarakat	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang Mengakses SINAS	1 Media	25 IKM	80.833.300	80.833.300		
					Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	25 Dokumen	80.833.300	80.833.300		

3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur Terhadap Pelayanan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur Terhadap Pelayanan Kantor	85 Persen	85 Persen						
						Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dan Anggaran yang di susun	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dan Anggaran yang di susun	100 Persen	100 Persen		8.629.629.814	8.638.673.989	9.044.175		
3	31	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dan Capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen/Tahun	10 Dokumen/Tahun		19.402.400	19.402.400	-		
3	31	01	2	01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		11.272.900	11.272.900	-		
3	31	01	2	01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan		6.429.500	6.429.500	-		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan		1.700.000	1.700.000	-		
3	31	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen		7.227.312.308	7.227.815.133	502.825		
3	31	01	2	02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	14 Bulan		7.026.742.308	7.027.245.133	502.825		
3	31	01	2	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	12 Dokumen		200.570.000	200.570.000	-		
3	31	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan		38.519.000	38.519.000	-		
3	31	01	2	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	5 Orang		38.519.000	38.519.000			
3	31	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	4 Laporan/ Tahun	4 Laporan/ Tahun		506.623.556	521.573.556	14.950.000		
3	31	01	2	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket		4.792.800	4.792.800	-		
3	31	01	2	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	9 Paket		163.545.856	178.495.856	14.950.000	Bertambah Makan -Minum Jamuan Tamu (Kudapan) Bahan Komunder	
3	31	01	2	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		27.837.900	27.837.900	-		
3	31	01	2	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	12 Laporan		310.447.000	310.447.000	-		

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di adakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di adakan	20 Unit	10 Unit		33.050.000	33.050.000	-	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10 Unit		33.050.000	33.050.000	-	
3	31	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan	4 Laporan/ Tahun	4 Laporan/ Tahun		668.368.000	681.405.800	13.037.800	
3	31	01	2	08 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	12 Laporan		5.088.000	5.088.000	-	
3	31	01	2	08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan		84.160.000	97.197.800	13.037.800	Penambahan Air Probil Kantor, Biaya Tagihan Bulanan PDAM Pasar Imbayud dan Token Listrik untuk CCTV Pasar Imbayud
3	31	01	2	08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		579.120.000	579.120.000	-	
3	31	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di pelihara	52 Unit	42 Unit		136.354.550	116.908.100	(19.446.450)	
3	31	01	2	09 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit		110.734.550	91.288.100	(19.446.450)	Suku Cadadang dan BBM
3	31	01	2	09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	38 Unit		25.620.000	25.620.000	-	
TOTAL											11.537.430.949	11.537.430.949	-	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian Tujuan Organisasi, visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung. Dalam rangka memaksimalkan capaian program dan kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan perubahan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Tana Tidung.

Tideng Pale Mei 2025
Kepala Dinas,



Hardani Yusri, SE
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 197308072006041009